



PENDIDIKAN DI SEKOLAH TAMAN SISWA (1922) DAN RELEVANSINYA DENGAN EMPAT POKOK KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR (2019)

Aprilia Nur Rahmawati, IKIP PGRI Wates, Indonesia

Anggar Kaswati, IKIP PGRI Wates, Indonesia

Siska Nurazizah Lestari, IKIP PGRI Wates, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) the background to the establishment of the Taman Siswa School; 2) the educational concept of Taman Siswa School; 3) the relevance of the Taman Siswa School's educational concept with Merdeka Belajar Policy. The method used is a historical research method with the stages of selecting topics, heuristics, verification, interpretations and historiography. The result of the study revealed that 1) Taman Siswa School was founded on July 3, 1922 in Yogyakarta by Ki Hajar Dewantara as a form of action against the state of education during the colonial government; 2) Education at Taman Siswa School is very concerned about achieving the ideal development of student by guiding them to become human beings who are independent both physically and mentally in accordance with the natural forces within each of them; 3) There is relevance between the concept of education at Taman Siswa School with Merdeka Belajar Policy is about the basis of the independence in carrying out education, the role of the teacher, and cooperation in realizing education (between schools, families and communities).

ARTICLE HISTORY

Received 02/09/2023
Revised 19/09/2023
Accepted 23/09/2023
Published 29/10/2023

KEYWORDS

Education; Merdeka Belajar; Taman Siswa.

CITATION (APA 6th Edition)

Rahmawati, A. N., Kaswati, A., Lestari, S. N. (2023). Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 537-546.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ aprilianurrahmawati4@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.8192>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan suatu bangsa, sebab melalui pendidikan, generasi penerus dapat dibentuk, karakter ditanamkan, dan kesadaran untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dapat tumbuh. Sebagaimana dikemukakan oleh (Surjomihardjo, 1986). Kualitas pendidikan memegang peranan sentral dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi langkah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa ini.

Perjuangan dalam bidang pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tak terlepas dari peran besar seorang tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terinspirasi oleh keprihatinannya melihat derita yang ditanggung oleh bangsanya di bawah penjajah Belanda. Melalui pengamatan dan analisis yang tajam terhadap kondisi pendidikan pada masa penjajahan, Ki Hajar Dewantara membangun kesadaran dan keyakinan bahwa sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan kolonial. Pendidikan tersebut hanyalah alat untuk mencetak tenaga-tenaga yang akan menokohkan dominasi penjajah serta membuat rakyat tunduk pada kepentingan mereka (Makmur, 1993).

Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tertuang dalam pola pendidikan di Sekolah Taman Siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Dewantara bahwa pendidikan itu merupakan suatu tuntunan yang membawa peserta didik untuk dapat menemukan potensi terbaik yang ada dalam dirinya (Dewantara, 1934). Dengan demikian dapat dilihat bahwa pola pendidikan di Sekolah Taman Siswa sangat mengutamakan kemerdekaan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk dapat menemukan karakter yang terdapat pada masing-masing peserta didik. Pendidikan di Sekolah Taman Siswa



menggunakan sistem “*among*” yaitu tidak mengenal adanya hukuman dan paksaan agar tidak mematikan jiwa merdeka dan kreativitas peserta didik.

Pola pendidikan di Sekolah Taman Siswa dengan menjunjung tinggi asas kemerdekaan terangkat kembali melalui gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dengan dikeluarkannya Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut lahir untuk memperbaiki sistem pendidikan sebelumnya yang umumnya masih bersifat kaku dan mengikat serta adanya ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan (Sutanto et al., 2020).

Dalam kerangka ini, terdapat persamaan awal dalam konsep “kemerdekaan” antara pola pendidikan yang berlaku di Sekolah Taman Siswa dan Kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam dan memahami relevansi antara keduanya. Dengan tujuan ini, penelitian ini difokuskan pada judul “Pendidikan Di Sekolah Taman Siswa (1922) Dan Relevansinya Dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019).”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan lima tahapan yang dilakukan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama pemilihan topik, merupakan tahapan paling awal dalam melakukan penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti menarik atau tidaknya suatu topik, ketersediaan sumber dan data, serta kesesuaian topik dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Tahap kedua heuristik, merupakan tahapan pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang dari berbagai tempat di antaranya Perpustakaan IKIP PGRI Wates, Perpustakaan Daerah Kulon Progo, Perpustakaan St. Kolese Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan dan Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahap ketiga verifikasi atau kritik sumber, merupakan tahapan dilakukan untuk memilih keabsahan atau identitas (kritik ekstern) dan kredibilitas (kritik intern) dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan agar kita bisa mendapatkan sumber yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Tahap keempat interpretasi, merupakan tahapan penafsiran terhadap sumber dilakukan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang bersifat subjektif dalam suatu fakta dengan cara menggabungkan data dan fakta yang ditemukan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tahap terakhir historiografi atau penulisan, merupakan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif (Kuntowijoyo, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Didirikannya Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta

Pendirian Sekolah Taman Siswa tidak terlepas dari peran seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Ia lahir pada hari Kamis Legi tanggal 2 Puasa 1818 H atau 2 Mei 1889 M di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Harjo Surjaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Ayah Suwardi Suryaningrat merupakan putra ketiga dari Kanjeng Gusti Hadipati Harjo Surjosasraningrat atau Sri Paku Alam III. Sementara itu ibunya merupakan putri dari Kanjeng Raden Tumenggung Notoprojo II yang merupakan keturunan dari seorang wali bernama Raden Rahmat atau Sunan Kalijaga (Wiryopranoto, Herlina, Marihandono, & Tangkilisan, 2017).

Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan di *Europeesche Legere School* (ELS) yaitu sekolah setingkat sekolah dasar milik Belanda yang terletak di Kampung Bintaran Yogyakarta. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke *Kweekschool* (Sekolah Guru) di Yogyakarta. Tidak lama kemudian ia

mendapat tawaran beasiswa dari dr. Wahidin Sudirohusodo untuk masuk ke *School Fit Opleiding Van Indische Artsen* (STOVIA) - Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Sayangnya, ia tidak berhasil menamatkan pendidikannya di STOVIA karena masalah kesehatan yang membuatnya tidak naik kelas sehingga beasiswa miliknya dicabut (Soeratman, [1986](#)).

Suardi Suryaningrat bergabung dalam *Indische Partij* bersama doktor Douwes Dekker dan doktor Tjipto Mangunkusumo. Ketiganya kemudian disebut dengan nama Tiga Serangkai. Selanjutnya pada awal Juli 1913 Suardi Suryaningrat bersama dengan Tjipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumiputera. Tulisan pertama yang dikeluarkan oleh komite tersebut adalah karangan Suardi Suryaningrat berjudul "*Seandainya saya seorang Belanda*" yang dimuat dalam Surat Kabar *De Expres* pada tanggal 13 Juli 1913. Tulisan tersebut merupakan isi hati rakyat sebagai reaksi terhadap rencana peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang juga akan dirayakan di Indonesia sebagai salah satu tanah jajahannya.

Disusul tulisan-tulisan lain dari tokoh tiga serangkai yang juga diterbitkan pada Surat Kabar *De Expres* yaitu karya Tjipto Mangunkusumo dengan judul "*Kekuatan atau Ketakutan?*", karya Suardi Suryaningrat dengan judul "*Satu Buat Semua, Tetapi Juga Semua Buat Satu*", dan karya Douwes Dekker dengan judul "*Pahlawan Kita: Tjipto Mangunkusumo dan Suardi Suryaningrat*". Akibat tulisan-tulisannya, ketiga pemimpin *Indische Partij* tersebut ditangkap dan ditahan oleh Pemerintah Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Belanda (Soeratman, [1986](#)). Tulisan-tulisan dari ketiga tokoh Tiga Serangkai merupakan bentuk aksi perlawanan terhadap kekuasaan Pemerintah Kolonial yang pada saat itu benar-benar merugikan rakyat pribumi.

Selain berkecimpung dalam bidang pers, Suardi Suryaningrat juga mempunyai ketertarikan pada bidang pendidikan. Disela-sela kesibukan bekerja sebagai jurnalis, Suardi Suryaningrat mengikuti perkuliahan singkat di *Lager Onderwijs* (Sekolah Guru) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda di Den Haag. Pada 12 Juni 1915 ia lulus dan mendapatkan akta mengajar *Akte van Bekwamheid als Onderwijzer* (Ijazah Keterampilan Mengajar). Tokoh pendidikan yang menjadi panutannya adalah Montessori, seorang pendidik dari Italia dan Rabindranath Tagore, tokoh pendidikan dari India (Wiryo Pranoto et al., [2017](#)). Ketertarikan Suardi Suryaningrat pada bidang pendidikan merupakan kesadaran bahwa pendidikan merupakan dasar perjuangan untuk meninggikan derajat rakyat di tanah airnya, sekaligus melihat tidak sesuainya pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap makna pendidikan yang sesungguhnya bagi rakyat.

Sejak saat kembali ke tanah air Suardi Suryaningrat mengubah haluan bidang perjuangannya dari politik menjadi pendidikan. Ia mengabdikan dirinya secara penuh dalam bidang pendidikan. Perjuangannya dalam bidang pendidikan semakin kuat setelah ia mendirikan Perguruan Taman Siswa. Pada tanggal 23 Februari 1928 saat berusia 40 tahun, dirinya secara resmi mengubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Alasan ia menghapus gelar yang menandakan asal-usul kebangsawannya berupa "Raden Mas" adalah agar bisa lebih dekat dengan rakyat (Soeratman, [1986](#)).

Sebelum mendirikan sekolah sendiri, Suardi Suryaningrat telah memiliki beberapa pengalaman dalam bidang pendidikan. Pertama, ia bekerja menjadi guru di Sekolah Adi Dharma, sekolah milik kakaknya (RM. Suryapranoto) selama satu tahun. Kedua, ia aktif dalam perkumpulan bernama Paguyuban *Selasa-Kliwonan* yang membahas kehidupan dan nasib bangsa Indonesia yang sengsara dan penuh penderitaan, dengan mencari jalan untuk menegakkan dan membina kepribadian bangsanya. Seperti yang dituliskan oleh Tauchid, bahwa Paguyuban *Selasa-Kliwonan* bercita-cita untuk memberikan kebahagiaan diri, bangsa, dan dunia. Cita-cita itulah yang kemudian menjadi cita-cita dari sekolah Taman Siswa (Tauchid, [1963](#)). Taman Siswa berdiri pada Senin Kliwon, 3 Juli 1922 dengan nama *Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa* di Jl. Tanjung, Pakualaman, Yogyakarta.

Berdirinya perguruan tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat sehingga sangat berkembang pesat dan dapat meluaskan cabangnya di berbagai tempat seperti Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Ambon (Wiryopranoto et al., 2017).

Lahirnya Sekolah Taman Siswa selain karena adanya cita-cita luhur yang muncul dari Paguyuban Selasa-Kliwonan juga dilatar belakangi oleh keadaan pendidikan dan pengajaran di tanah air pada waktu itu yang dianggap mengecewakan. Pada waktu itu setelah Pemerintah Kolonial menjalankan kebijakan Politik Etis, jumlah sekolah bertambah banyak karena pendidikan merupakan salah satu program kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh Ratu Wilhelmina pada 1899 di samping irigasi dan emigrasi. Dengan adanya Politik Etis maka Pemerintah Kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi (Soeratman, 1982). Pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan Belanda tetap disesuaikan dengan kepentingan mereka dan membiarkan rakyat pribumi dalam kebodohan serta keterbelakangan. Hal tersebut dilakukan agar rakyat pribumi tidak sampai menjadi bangsa yang sadar akan harga dirinya sebagai suatu bangsa yang berhak untuk mencapai kemerdekaannya. Apabila rakyat menyadari akan rasa kebangsaannya, tentu akan menjadi ancaman bagi penjajah dalam menjalankan strategi kolonialismenya.

Konsep Pendidikan di Sekolah Taman Siswa

Pendidikan dalam Taman Siswa bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka baik lahir maupun batinnya dengan keluhuran akal budi dan jasmaninya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan bangsa dan tanah air serta manusia pada umumnya. Merdeka lahir batin dianggap sebagai tujuan utama yang akan menjadi akar bagi tumbuhnya keluhuran budi dan kesejahteraan bangsa dan tanah air (Soeratman, 1982).

Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa maksud pendidikan dalam Taman Siswa adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat (*Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan*, 2011). Kekuatan kodrat yang dimaksud adalah semua kekuatan dalam diri anak baik lahir maupun batin yang timbul atas kekuasaan kodrat masing-masing anak. Pamong sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki proses tumbuhnya, bukan dasarnya.

Dalam melaksanakan pendidikannya, Taman Siswa memiliki suatu anggaran yang disebut Asas 1922. Berdasarkan yang dimuat dalam *Majalah Poesara* edisi Juli 1932, Jilid II (No. 9-10), hlm. 76, asas 1922 mengandung 7 pasal sebagai berikut:

- 1) Hak mengatur diri sendiri (*zelfbeschikkingsrecht*) dengan memperhatikan ketertiban umum.
- 2) Membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin.
- 3) Melaksanakan pendidikan nasional sebagai usaha kebudayaan yang bersumber pada kebudayaan bangsa sendiri untuk mencapai masyarakat yang berbudaya (*nationaal, cultural-maatschappelijke*).
- 4) Mengutamakan pemerataan pengajaran daripada peningkatan mutu apabila usaha peningkatan mutu pengajaran itu menghambat pemerataannya.
- 5) Menolak adanya bantuan yang bersifat mengikat.
- 6) Melaksanakan hidup mandiri (*zelfbedruipings-system*) dengan cara hidup hemat dan sederhana.
- 7) Bekerja tulus ikhlas mengabdikan kepada sang anak/peserta didik ("Asas-Asas Taman Siswa," 1932).

Ketujuh pasal asas Taman Siswa tersebut di atas merupakan asas yang sangat penting bagi perjuangan melaksanakan tujuan luhur untuk pendidikan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia yang juga sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain Asas 1922, Sekolah Taman Siswa juga memiliki lima dasar pendidikan yang dibentuk pada Rapat Besar Taman Siswa 1947 yaitu “Dasar Pancadarma Taman Siswa”, lima dasar atau sering disebut Pancadarma tersebut adalah:

- 1) Dasar Kodrat Alam, merupakan perwujudan dari kekuasaan Tuhan yang mengandung arti bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu dengan alam semesta ini sehingga manusia tidak dapat lepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam dalam dirinya.
- 2) Dasar Kemerdekaan, mengandung arti bahwa kemerdekaan merupakan karunia Tuhan yang memberikan hak kepada manusia untuk mengatur hidupnya sendiri dengan selalu memperhatikan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu kemerdekaan harus menjadi dasar dalam pembentukan pribadi yang kuat dan sadar untuk mencapai keselarasan dengan masyarakat.
- 3) Dasar Kebudayaan, mengandung arti keharusan untuk memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Dalam proses pemeliharaan kebudayaan nasional tersebut, yang paling utama adalah untuk membawanya ke arah yang lebih maju dan disesuaikan dengan kecerdasan zaman dan kemajuan dunia guna kepentingan hidup rakyat lahir-batin dalam setiap keadaan zaman.
- 4) Dasar Kebangsaan, mengandung arti adanya rasa satu bersama bangsa sendiri dalam suka maupun duka dan dalam keinginan untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir-batin seluruh bangsa. Di Taman Siswa anak didik agar dapat memiliki rasa nasionalisme dengan cara menanamkan rasa cinta kasih terhadap bangsa dan tanah airnya sendiri.
- 5) Dasar Kemanusiaan, mengandung arti bahwa kemanusiaan merupakan darma pada setiap diri manusia yang timbul dari keluhuran akal dan budinya. Pendidikan yang dilandasi dengan rasa kemanusiaan akan mewujudkan perkembangan individu sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu cerdas secara emosional, spiritual, dan juga nalar (Wiryoentono, [1982](#)).

Asas 1922 dan Dasar Pancadarma digunakan oleh Sekolah Taman Siswa sebagai pedoman dalam membuat sistem pendidikan di dalamnya. Sistem tersebut terbentuk dari berbagai komponen di antaranya metode pengajaran yang dilakukan, suasana pendidikan, pengorganisasian pendidikan, konsep sekolah, dan pembagian periode pendidikan serta pengajaran yang diberikan. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan di sekolah Taman Siswa adalah sebagai berikut:

1) Metode Pengajaran

Berdasarkan pernyataan dalam Peraturan Besar Persatuan Taman Siswa tahun 1980, pendidikan di sekolah Taman Siswa dilaksanakan dengan metode *Among*. Metode ini dilaksanakan dengan berpedoman pada dasar kodrat alam dan kemerdekaan (Soeratman, [1982](#)). Melalui sistem tersebut Taman Siswa sangat memperhatikan kebebasan anak didiknya. Kebebasan yang dimaksud adalah dengan menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya paksaan dan hukuman sehingga menuntun anak didiknya untuk mengatur dirinya sendiri.

Menurut Surjomihardjo berdasarkan sistem *among*, setiap pamong atau pendidik dalam proses pembelajaran harus bersikap sesuai dengan semboyan *Tut Wuri Handayani* (Surjomihardjo, [1986](#)). Berdasarkan semboyan tersebut seorang pamong diwajibkan untuk berperan sebagai seorang pemimpin yang berdiri di belakang tetapi mempengaruhi dengan memberikan kesempatan dan dorongan kepada anak didik untuk berusaha sendiri mewujudkan pengetahuannya. Di samping itu pamong diharapkan dapat membangkitkan pikiran murid apabila berada di tengah-tengah mereka

(*Ing Madya Mangun Karsa*) dan memberi contoh yang baik apabila di depan para murid (*Ing Ngarsa Sung Tuladha*).

2) Suasana Pendidikan

Suasana pendidikan di sekolah Taman Siswa harus bersifat kekeluargaan. Melalui penghayatan suasana kekeluargaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong, dan tanggung jawab dalam diri anak didik. Karena sifat kekeluargaan tersebut pamong dianggap sebagai bapak dan ibu oleh anak didiknya, sementara itu anak didik dianggap sebagai anak sendiri oleh para pamong sehingga ketika di sekolah setiap anak bisa memanggil pamongnya dengan sebutan bapak atau ibu sesuai pengajar pria atau wanita (Sagimun, [1974](#)).

Suasana kekeluargaan yang diterapkan oleh sekolah Taman Siswa dalam proses pembelajarannya akan membuat anak didik merasa nyaman dan terlindungi. Kekeluargaan menggambarkan di mana setiap orang dalam keluarga itu sama derajatnya, sama-sama memiliki hak kemerdekaannya. Akan tetapi mereka juga harus bertanggungjawab dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing.

3) Pengorganisasian Pendidikan

Pengorganisasian pendidikan dalam sekolah Taman Siswa bersifat Tri-Pusat. Sistem Tri-Pusat Pendidikan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk dapat memperoleh pendidikan dari tiga pusat, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, dan lingkungan kemasyarakatan. Melalui sistem tersebut, ketiga pusat pendidikan di atas dapat saling bekerja sama dalam satu kepentingan yaitu mewujudkan pendidikan bagi anak didik (Surjomihardjo, [1986](#)). Di dalam Majalah *Wasita* edisi Juni 1934, Jilid I (No.4-5), hlm. 82-86, dituliskan bahwa alam keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan terpenting, alam perguruan (sekolah) adalah pusat pendidikan yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan ilmu pengetahuan, sedangkan alam pemuda atau masyarakat merupakan bentuk penyokong pendidikan, baik menuju kecerdasan jiwa dan maupun tingkah laku sosial (Dewantara, [1934](#)).

4) Konsep Sekolah

Sekolah Taman Siswa yang pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta memiliki konsep pendidikan yang berbentuk *paguron* atau perguruan. Secara harfiah kata *paguron* berarti tempat untuk guru tinggal. *Paguron* di sini diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk belajar sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para pamongnya (Wiryopranoto et al., [2017](#)). Dengan konsep tersebut maka murid masih berkesempatan untuk berinteraksi, belajar, meminta bantuan kepada para pamong walaupun di luar jam pembelajaran. Pamong tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja namun juga memberikan ilmu tentang nilai-nilai kehidupan. Konsep tersebut seperti konsep-konsep yang digunakan dalam pondok pesantren, yaitu asrama di mana para murid dan guru hidup bersama-sama dengan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.

5) Pembagian periode pendidikan dan pengajaran

Berdasarkan majalah *Poesara* edisi Juni 1940, Jilid X (No. 6), hlm 7-8, Lembaga sekolah di Taman Siswa disesuaikan dengan tingkatan periode perkembangan jiwa di atas yaitu:

a) Taman Anak, untuk usia 0-7 tahun (masa *wiraga*)

Pada tingkat ini anak diberikan pelajaran yang berguna untuk melatih raga atau badan mereka. Seperti diajarkan olahraga dengan nyanyian dan tari, nyanyian rakyat seperti tembang macapat,

menggambar corak dan warna, cerita yang berwujud dongeng dan mitos yang ada di daerahnya (menggunakan metode sari wara atau dengan lagu), kemasyarakatan dan kenasionalan.

b) Taman Muda, untuk usia 7-14 tahun (masa *wiraga-wirama*)

Pada tingkat ini diajarkan olahraga-pencak-tari, tembang Jawa (tembang macapat, tembang gending) disertai gamelan, menggambar dengan kepandaian, bahasa dan cerita sastra sampai keagamaan baik daerah sekitar-nasional-internasional, dan pengetahuan tentang kodrat alam, bumi, negeri serta pergaulan umum baik di tanah air, Benua Asia, maupun benua lainnya.

c) Taman Dewasa, untuk usia 14-21 tahun (masa *wirama*)

Pada tingkat ini diajarkan olahraga yang diteruskan dengan tujuan untuk dapat mempertahankan diri, kesenian asing, bahasa daerah-nasional (Indonesia)-asing (Inggris), ilmu keagamaan, mitos dan legenda dari luar Indonesia, ilmu sosiologi dan ekonomi (Dewantara, [1940](#)).

Program Merdeka Belajar dan Relevansinya dengan Pendidikan di Sekolah Taman Siswa

Merdeka Belajar adalah suatu program kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada Desember 2019. Kebijakan Merdeka Belajar menawarkan konsep baru dalam dunia pendidikan yaitu dengan memberikan kebebasan berpikir dan berinovasi, baik kepada pendidik maupun peserta didik. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pendidikan dapat memberikan ruang untuk belajar secara mandiri dan kreatif ("Kebijakan Merdeka Belajar 1: Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar," [2019](#)).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menetapkan empat pokok kebijakan Merdeka Belajar. Menurut Mendikbud, empat pokok kebijakan pendidikan baru ini akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang berfokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Wijiatun & Indrajit, [2022](#)). Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Mendikbud adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) digantikan dengan asesmen, Penghapusan Ujian Nasional (UN) dan diganti dengan asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Perluasan sistem Zonasi dalam PPDB.

Kebijakan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim pada 2019 rupanya sejalan dengan pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Taman Siswa. Terdapat beberapa 71 poin di antara keduanya memiliki esensi yang sama. Hal tersebut berarti konsep pendidikan di sekolah Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun lalu ternyata masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan di Indonesia masa kini. Beberapa relevansi yang terdapat di antara keduanya adalah sebagai berikut:

1) Kemerdekaan dan Kemandirian dalam Menyelenggarakan Pendidikan

Di Sekolah Taman Siswa, pendidikan dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat alam yang ada pada diri peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat (*Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan*, [2011](#)). Berdasarkan pandangan tersebut dapat dilihat bahwa esensi pendidikan yang dilakukan sangat memperhatikan perkembangan peserta didik sehingga pendidikan menjadi sarana bagi peserta didik untuk dapat secara bebas mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Pendidikan yang dimaksudkan Sekolah Taman Siswa di atas mengandung unsur kemerdekaan bagi peserta didik karena peserta didik diberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, yakni

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dasar dari kemerdekaan tersebut adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi kodrati untuk mencapai kebebasan yang mengarah kepada pencapaian tujuan hidup mereka. Pencapaian-pencapaian menuju kebebasan tersebut ditempuh dan dijalani dengan sebuah proses yang bernama belajar (Samho, [2013](#)).

Konsep Kebijakan Merdeka Belajar rupanya juga seirama dengan maksud pendidikan yang ada di Sekolah Taman Siswa. Dapat dilihat bahwa Kebijakan Merdeka Belajar memiliki esensi utama mengedepankan kemerdekaan dalam proses belajar mengajar, yakni kemerdekaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal dengan cara memberi kebebasan berpikir kepada peserta didik, di samping itu guru diberikan kebebasan untuk menginovasikan pembelajaran. Hal tersebut dinilai akan sangat efektif untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Wijiatun & Indrajit, [2022](#)).

Asas Taman Siswa, Pasal ke-1 yang berisi tentang hak untuk mengatur dirinya sendiri dan pasal ke-2 berisi membentuk peserta didik menjadi manusia yang merdeka baik lahir maupun batinnya. Kedua pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri. Peserta didik maupun guru memiliki kebebasan berpikir dan berinovasi dalam proses pembelajaran (Surjomihardjo, [1986](#)).

Kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri relevan dengan kebijakan merdeka belajar dalam penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) yang kemudian diganti dengan asesmen yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tes tertulis atau penilaian lain seperti portofolio, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan survei karakter, pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, [2018](#)). Pelaksanaan asesmen dilakukan dan diatur oleh masing-masing sekolah sehingga sekolah dan guru memiliki hak mutlak dalam menilai kemampuan peserta didiknya. Selain itu, melalui kebijakan tersebut peserta didik lebih merdeka dalam mengembangkan potensinya karena standar kelulusan bukan lagi mengacu pada hasil yang diperoleh dari USBN dan UN.

2) Peran Guru

Pasal ke-7 dalam Asas 1922 berisi bahwa seorang guru harus ikhlas lahir dan batin untuk mengabdikan kepada peserta didiknya. Hubungan antara guru dan peserta didik tidak boleh terlalu jauh dan harus dilandasi dengan rasa cinta kasih dan sayang. Dalam melaksanakan tugasnya, guru didorong oleh kecenderungan batinnya untuk menyerahkan diri kepada tugasnya tersebut.

Pasal ke 7 Asas 1922 relevan dengan kebijakan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam Merdeka Belajar yang memberikan guru lebih banyak waktu untuk fokus mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran. Setelah guru mendapatkan kemerdekaannya dan dapat menjalankan tugasnya untuk mendidik dan mengajar secara optimal, maka guru juga harus memberikan kemerdekaan kepada para peserta didiknya. Pendidikan yang dilakukan harus bersifat terbuka dan tidak memaksa. Terbuka dan tidak memaksa yang dimaksud adalah dalam arti menuntun peserta didik sesuai dengan

Sekolah Taman Siswa juga menggunakan metode *among* dalam pembelajarannya, metode tersebut dapat diartikan bahwa pendidik harus bersifat mengasuh. Mengasuh berarti pendidik dapat memimpin, mengelola, dan membimbing peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Di dalam metode *among*, peserta didik diberikan kebebasan bergerak, berpikir, berinovasi sesuai dengan kemauannya, tetapi pamong atau pendidik juga tidak sepenuhnya

melepaskan, pendidik akan bertindak sewajarnya ketika apa yang dilakukan peserta didik telah melenceng dari tujuan pendidikan dan berpeluang membahayakan dirinya.

Peran pendidik dalam sistem *among* di atas sesuai dengan peran guru yang terdapat dalam kebijakan Merdeka Belajar, di mana Kebijakan Merdeka Belajar menawarkan konsep baru dalam dunia pendidikan yaitu dengan memberikan kebebasan berpikir dan berinovasi, baik kepada pendidik maupun peserta didik. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pendidikan dapat memberikan ruang untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Kemandirian belajar peserta didik tersebut berarti dalam pembelajaran peserta didiklah yang memiliki peran penting, seorang guru hanya bertindak sebagai fasilitator.

3) Kerja Sama dalam Mewujudkan Pendidikan

Dalam menyelenggarakan pendidikannya, Sekolah Taman Siswa menyelenggarakan kerja sama yang selaras antara tiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat atau yang disebut dengan sistem Tri Pusat Pendidikan (Surjomihardjo, 1986). Melalui sistem tersebut ketiga pusat pendidikan saling bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan bagi peserta didik.

Sistem Tri Pusat Pendidikan relevan dengan kebijakan Sistem Zonasi dalam Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar tentang sistem Zonasi dalam PPDB mengatur sekolah-sekolah agar menerima peserta didik yang berdomisili di lingkungan sekolah atau rumahnya dekat dengan sekolah. Sistem Zonasi ini sebenarnya telah lahir sebelum adanya kebijakan Merdeka Belajar, namun pelaksanaannya digalakkan kembali oleh Mendikbud Nadiem Makarim melalui kebijakan Merdeka Belajar ini. Hal tersebut sesuai apa yang diatur dalam Pasal 16 Permendikbud No.14 Tahun 2018 yang berbunyi: "Sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada jarak paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat di Kartu Keluarga yang terbit paling lambat enam bulan sebelum masa PPDB" (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, 2018). Dengan diterapkannya sistem zonasi maka memungkinkan peserta didik untuk bersekolah di wilayah yang dekat dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sehingga ketiga elemen tersebut akan lebih mudah untuk saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan peserta didik. Sinergi antara ketiga elemen tersebut sangat berperan penting dalam menunjang kompetensi dan juga karakter peserta didik.

SIMPULAN

Konsep pendidikan di Sekolah Taman Siswa ternyata relevan dengan kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar pertama kali digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2019. Kebijakan baru tersebut memberikan kebebasan kepada peserta didik dan guru untuk dapat berpikir dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin-poin yang relevan di antara konsep pendidikan di Sekolah Taman Siswa dengan Kebijakan Merdeka Belajar di antaranya adalah mengenai dasar kemerdekaan dan kemandirian dalam pendidikan, peran guru, dan kerja sama dalam mewujudkan pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Dengan adanya kesesuaian-kesesuaian di antara keduanya maka dapat diketahui bahwa Kebijakan Merdeka Belajar merupakan perwakilan dari konsep pendidikan yang ada di Sekolah Taman Siswa yang dimanifestasikan kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia meskipun pada pengimplementasiannya masih terdapat tantangan yang dihadapi terutama terkait perbedaan kondisi antara zaman berdirinya Sekolah Taman Siswa dengan saat ini.

REFERENSI

- Asas-asas Taman Siswa. (1932, June). *Majalah Poesara Jilid II No 9-10*.
- Dewantara, K. H. (1940, June). Pembahagian Pelajaran Kebangsaan Tiap-tiap Tingkatan Pengajaran. *Majalah Poesara Jilid X No 6*.
- Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan* (Cetakan kedua). (2011). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
- Kebijakan Merdeka Belajar 1: Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar. (2019, December 11).
- Dewantara, K. H. (1934, June). Stellingen Ki Hajar Dewantara. *Majalah Wasita Jilid I No 4 – 5*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Makmur, D. (1993). *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat. , Pub. L. No. 14, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) (2018). Indonesia: BN 2018/NO 605; KEMDIKBUD.GO.ID; 19 HLM.
- Sagimun, M. D. (1974). *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Samho, B. (2013). *Visi Pendidikan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeratman, D. (1982). *Pemahaman dan Penghayatan Asas-asas Taman Siswa*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Soeratman, D. (1986). *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surjomihardjo, A. (1986). *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sutanto, P., Akbar, W. J., Heriyanto, W., Prasetya, I. H., Nurbani, D. F., & Ardijansah, D. (2020). *Buku Saku Merdeka Belajar: Prinsip dan Implementasi pada Pendidikan SMA*. Jakarta: Direktorat SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tauchid, Moch. (1963). *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Wijiatur, L., & Indrajit, R. E. (2022). *Merdeka Belajar: Tantangan dan Implementasinya dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Wirjosentono, M. (1982). *Sejarah Perjuangan Taman Siswa Sejak Kemerdekaan (1952 – 1982)*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.